

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Perceraian dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian dalam Islam

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut dengan “ *talak* ” atau “ *furqah* “. *Talak* berarti membuka ikatan, *furqah* berarti bercerai.³³ Perkataan *talak* dan *furqah* dalam istilah fiqh mempunyai arti umum dan arti yang khusus. Arti yang umum ialah, segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim, dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggal dunia dari suami atau istri. Adapun arti khusus ialah, perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.³⁴ Perkataan *talak* oleh ahli fiqh terdahulu³⁵ lebih banyak diartikan dengan arti yang umum daripada arti yang khusus.

Berdasar pengertian di atas, maka dapat difahami bahwa hubungan hukum yang melandasi perceraian adalah adanya hubungan perkawinan, yang dalam hal ini perkawinan dalam lingkup hukum Islam. Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh, dipakai dengan perkataan “ *nikah* ” dan “ *ziwaj* “. *Nikah* menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Arti *nikah* yang sebenarnya adalah *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedang arti kiasannya adalah “ *watha'* ” yang berarti bersetubuh atau “ *aqd* ” yang berarti mengadakan

³³ Kamal Muhtar, *Asas – Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2004) hlm. 156

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, yang dimaksud dengan ahli fiqh yang terdahulu ialah ahli fiqh sebelum abad ke 20 Masehi

perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari – hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya³⁶.

Allah *s.w.t.* menyatakan bahwa nikah itu bukanlah perjanjian yang biasa saja, tetapi perjanjian yang kuat (*mitsaqan Ghalidza*), sebagaimana difirmankan dalam Al Qur'an Surat an-Nisaa ayat 21, yang artinya sebagai berikut :

“ *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat* ”.³⁷ Oleh karena perkawinan merupakan akad (perjanjian) yang kuat, maka untuk memutuskan suatu hubungan perkawinan juga haruslah dengan alasan yang kuat³⁸.

Meski sedemikian agama Islam menyatakan kukuhnya nilai ikatan perkawinan tersebut, tetapi tetap meniscayakan terjadinya perceraian, yang pensyariatannya diatur dalam Al Qur'an, Al hadits dan pendapat – pendapat ahli hukum Islam.

Beberapa ketentuan syari'at tentang perceraian antara lain sebagai berikut :

³⁶ Ali Maqri al- Fatuni, *Al Misbahul Munir*, sebagaimana dikutip oleh Kamal Muhtar, *Ibid.* hlm 1

³⁷ *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2011) hlm 105

³⁸ Lihat ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa perceraian hanyadapat terjadi jika :

1. Dilakukan di depan sidang pengadilan.
2. Pengadilan sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil
3. harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapatrukun sebagai suami isteri

1. Al Qur'an, Surat at-Thalaq ayat (1), yang artinya sebagai berikut ::

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddanya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddanya itu dan bertakwalah kepada Allah tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (izinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesuatu itu sesudah hal yang baru”³⁹.

2. Al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229, yang artinya sebagai berikut:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik . tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggar, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”⁴⁰.

3. Al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 230, yang artinya sebagai berikut:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada

³⁹ Kementrian Agama RI, *Op.cit.* hlm. 816

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 45

dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui’’⁴¹

4. Al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 231, yang artinya sebagai berikut:

“Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka dengan untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka, Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim ingatlah nikmat Allah padamu. Dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al kitab dan Al Hikma (As sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-nya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bawasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu’’⁴².

5. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim dan Abu Daud, yang artinya :

Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Rosulullah SAW bersabda, sesuatu yang halal yang dibenci Allah adalah talak/perceraian (H.R Abu Daud Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim dan Abu Daud).⁴³

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 46

⁴² *Ibid*

⁴³ M.Ibnu Ismail, *Subulus Salam, Vol III* (Semarang: Thoah Putra, tanpa tahun), Hlm. 168

Meskipun mensyari'atkan perceraian, bukan berarti agama Islam menyukainya atau sekurang – kurangnya pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian, tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai sesuatu yang *musykil*⁴⁴.

Pada dasarnya talak itu dilarang dalam Islam, kecuali jika benar – benar diperlukan. Ketika Allah menjadikan talak di tangan suami, bukan berarti ia bebas untuk menjatuhkannya kapanpun dan bagaimanapun. Tetapi Allah memberikan ketentuan – ketentuannya dan menjelaskan tatacara yang sesuai dengan syariat dalam menjatuhkan talak, mengenai waktu, jumlah dan sifat talak. Dengan demikian kekuasaan suami menjadi terbatas karena ada aturan – aturan tertentu dalam menjatuhkan talak. Tujuannya adalah agar dalam menjatuhkan talak suami tidak semata – mata mendasarkan pada rasa marah. Maka, sebaik – baik talak yang diajukkan suami adalah talak sekali dan bersifat *raj'i*⁴⁵.

2. Klasifikasi Perceraian dalam Islam

Abd. Rahman Ghazaly⁴⁶, menyatakan bahwa di dalam Islam, suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu :

1. karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya,
2. karena terjadi perceraian yang terjadi antara keduanya,
3. atau karena sebab – sebab yang lain.

⁴⁴ Kamal Muhtar, *Op.cit.* hlm. 159.

Juga menambahkan Pengertian kata *Musykil* adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas dari suatu peraturan atau pokok dasar dari undang – undang.

⁴⁵ Abd. Al Adzim Ma'ani, *Hukum – Hukum dari Al Qur'an dan Hadis*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003) Hlm. 119

⁴⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2003) hlm. 191.

Selain itu, Kamal Muchtar⁴⁷, seperti yang telah disampaikan dalam bab pendahuluan di atas, mengklasifikasi perceraian ditinjau dari orang yang berwenang menjatuhkan, adalah :

1. yang dijatuhkan oleh suami, dinamakan talak
2. yang diputuskan oleh hakim karena gugatan cerai dari istri.
3. yang putus dengan sendirinya, seperti karena salah seorang dari suami istri meninggal dunia.

Klasifikasi yang lain dari perceraian yang dipaparkan Kamal Muchtar, adalah, ada talak yang sesuai dengan sunnah Nabi disebut dengan *Talak Sunni* dan ada pula talak yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, disebut *Talak Bid'i*. Kemudian, jika ditinjau dari segi hak bekas suami untuk rujuk setelah terjadi perceraian, maka perceraian dapat diklasifikasi menjadi *Talak Raj'i* dan *Talak Bain*, dimana talak bain dibagi menjadi dua, *Talak Bain Sughro* dan *Talak Bain Kubro*. Talak boleh dilakukan oleh orang yang berhak menjatuhkannya, boleh pula diwakilkan atau diserahkan menjatuhkannya kepada orang lain. Ada pula perceraian yang dijatuhkan oleh hakim, berdasarkan kepada gugatan yang diajukan oleh pihak – pihak yang berhak terhadap suatu perkawinan. Apabila gugatan itu terbukti maka hakim harus memberi putusan sesuai dengan gugatan yang diajukan seperti perceraian yang diputuskan hakim karena perkara *syiqaq*, *zihar*, *li'aan* dan *fasakh*⁴⁸.

⁴⁷ Kamal Muchtar, *Op.cit* hlm 159

⁴⁸ *Ibid*

Dalam hal seorang istri meminta untuk diceraikan (menggugat terjadinya perceraian). Abd. Al Adzim Ma'ani⁴⁹ menyatakan Surat Al Baqarah ayat 229 sebagaimana tersebut di atas diturunkan mengenai seorang yang bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay dan suaminya Tsabit bin Qaiys bin Syamasy. Suatu saat Jamilah tersebut mendatangi Rasulullah, dan meminta agar ia diceraikan dari suaminya karena ia sangat membenci suaminya tersebut. Selanjutnya kepada Rasulullah, Tsabit tersebut meminta agar Rasul memerintahkan Jamilah untuk mengembalikan kebun yang telah ia berikan. Setelah disampaikan, Jamilah pun ternyata menyetujui, bahkan akan menambahkannya, maka Rasul bersabda : “ *tidak, kembalikan saja kebunnya* “ dan selanjutnya bersabda kepada Tsabit : “ *Ambillah darinya kebun yang telah kamu berikan kepadanya dan biarkan ia bebas* “.

Dalam Islam, itulah kasus gugatan perceraian yang pertama. Adapun hikmah diperbolehkan istri melakukan gugatan cerai adalah untuk menghindarkan diri dari kesusahan dan untuk membebaskannya dari hubungan pernikahan, karena kebahagiaan berumah tangga tidak bisa ia capai lagi.

⁴⁹ Abd. Al Adzim Ma'ani, *Op.Cit.* Hlm. 124

3. Gugatan Cerai Karena Suami Pergi Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya.

Orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, dalam fiqh disebut *mafqud*. Kata *mafqud* secara bahasa memiliki arti yaitu *faqodah* yang berarti hilang atau tiada⁵⁰. Menurut Wahbah Az- Zuhaily, *mafqud* adalah orang yang hilang yang tidak bisa di pastikan kedatangannya kembali atau apakah dia sudah mati sehingga kuburannya tidak dapat di ketahui⁵¹.

Para ulama berpendapat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap hartanya dan apa yang harui dilakukan oleh istrinya disini ada 2 alternatif:

- a. Ia dianggap masih hidup, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi istrinya. Dengan demikian istrinya masih berhak mendapat hartanya sampai ada berita mengenai mati atau hidupnya.
- b. Ia dianggap sudah mati, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi istrinya. Dengan demikian istrinya sudah keluar dari ikatan nikah dengannya, dan hartanya dibagikan kepada para ahli warisnya.

Mohamad Thoha⁵² menguraikan pendapat ulama tentang gugatan perceraian yang diajukan istri karena suaminya pergi tidak diketahui tempat keberadaannya, antara lain dalam kitab *I'anatut Tholibin* juz 4 halaman 60 menyatakan :

⁵⁰ Mahmud yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidayat Agung, 1989), hlm. 320

⁵¹ Wahbah Az Zuhaily, *Fiqhul Islam Waadillutuhu*, (Beirut : Daarul fikr juz 6, tanpa tahun). Hlm. 609

⁵² Mohamad Thoha, *Kumpulan Kaidah – Kaidah Hukum*, (Surabaya : Ghalia Terang, 2000). Hlm. 31.

Apabila berita tentang suaminya terputus (ghaib), sedangkan dia 9 suami) tidak meninggalkan harta, maka bagi pihak istri boleh mengajukan gugatan fasakh.

Juga dalam kitab *Al Bajury* juz 2 halaman 193, menyatakan :

Dan apabila suami ghaib dari istrinya dengan meninggalkan persyaratan bergaul, kemudian istri mengadu kepada hakim dan dibenarkan oleh dua orang saksi, maka diperbolehkan (menjatuhkan) fasakh antara istri dan suami tersebut.

B. Pelembagaan Sengketa Perceraian dalam Hukum Islam di Indonesia

1. Prinsip Kewenangan Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara Perceraian

Reformasi hukum di bidang lembaga hukum menyeruak dalam penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia yang melahirkan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada pasal 24 ayat (2), yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵³

Pembagian lembaga peradilan tersebut sekaligus memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada masing – masing pengadilan sesuai yang ditentukan oleh undang – undang. Pada dasarnya, suatu kewenangan

⁵³ Ahmad Mujahidin, *Op.cit.* Hlm. 3

pengadilan untuk mengadili perkara, senantiasa didasarkan atas 6 (enam) prinsip dasar, yaitu : (1) Kompetensi absolut setiap pengadilan didasarkan atas tujuan dibentuk dan diselenggarakan pengadilan. Untuk apa suatu pengadilan itu dibentuk jika tidak diberi kekuasaan sesuai tujuannya; (2) Kompetensi absolut pengadilan didasarkan atas persesuaian antara spesifikasi pengadilan dengan spesialisasi perkaranya; (3) Kompetensi absolut pengadilan bersifat monopoli; (4) Kompetensi absolut pengadilan atas suatu perkara bersifat utuh (*holistic/kaaffah*) meliputi seluruh bagian dari sistem hukum setiap jenis perkara; (5) Kompetensi absolut setiap pengadilan diatur dalam undang-undang; dan (6) Dalam hal terjadi kekosongan undang-undang yang mengaturnya maka penetapan kompetensi absolut atas suatu perkara dikembalikan kepada prinsip dasar semula, yakni tujuan dibentuk dan diselenggarakannya suatu pengadilan.⁵⁴

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan kewenangan masing – masing dari lembaga peradilan tersebut. Tugas peradilan dalam ketentuan pasal 25 undang – undang tersebut meliputi memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan undang – undang.⁵⁵

⁵⁴ A. Mukti Arto *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuris, dan Pragmatis* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012). Hlm. 63.

⁵⁵ Pasal 25 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyebutkan :

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁵⁶

Sebagaimana telah disebutkan di bab pedahuluan di atas, sengketa – sengketa perkawinan di Indonesia dilembagakan dalam sebuah proses peradilan⁵⁷, dimana peradilan agama termasuk yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Sejalan dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan dalam pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan hal yang sama, dengan memberi penegasan definisi bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang – undang tersebut adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam lingkungan Peradilan Agama⁵⁸

-
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II* (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014). Hlm.55

⁵⁷ Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

⁵⁸ Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Konstitusi menentukan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁵⁹

Perincian kewenangan masing – masing bidang tersebut, terurai dalam penjelasan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006, **yang dalam bidang perkawinan** disebutkan sebagai berikut :

Huruf a ; Yang dimaksud dengan perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang *yang* belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;

⁵⁹ Alenia pertama Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta terdapat pula pada pasal 49 undang – undang tersebut.

10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah ditentukan bahwa

berdasarkan ketentuan 49 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 serta penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 8 dan 9, perkara perceraian antara orang yang beragama Islam⁶⁰, menjadi kewenangan peradilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Jenis perkara tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu, Cerai Talak (angka 8) dan Cerai Gugat (angka 9). Pengaturan tentang Prosedur dan pemeriksaan masing – masing jenis perkara perceraian tersebut, lebih lanjut diuraikan dalam Bab IV, bagian kedua dari undang – undang tersebut. Cerai Talak diatur dalam pasal 66 hingga 72 dan untuk Cerai Gugat diatur dalam 73 hingga 86⁶¹.

M. Yahya Harahap⁶² menguraikan prinsip – prinsip hukum tentang pengaturan perkara cerai gugat dalam undang – undang peradilan agama tersebut sebagai berikut :

1. Pihak – Pihak :

Istri bertindak sebagai Penggugat, dan suami didudukkan sebagai Tergugat.

2. Kompetensi Relatif :

Gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat, kecuali apabila istri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

3. Formulasi Gugatan :

⁶⁰ Berlaku **asas personalitas keislaman**, yang berdasarkan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, hlm. 59 pada prinsipnya menentukan, pasal 49 tersebut menganut asas personalitas keislaman, tentang makna orang yang beragama Islam, dalam bidang perkara perkawinan adalah sengketa perkawinan yang perkawinannya tercatat di kantor urusan agama, meski suami atau istri atau kedua belah pihak telah keluar dari agama Islam.

⁶¹ Mahkamah Agung RI, *Op.cit. Hlm 148-149*

⁶² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) hlm. 234-235.

Gugatan bersifat *Contentiosa*, yakni mengandung sengketa. Gugatan boleh digabungkan dengan gugatan lain yang mempunyai hubungan erat dengan pokok perkara cerai gugat tersebut, misalnya penguasaan anak, nafkah dan harta bersama. Serta boleh juga diajukan gugatan tindakan insidental seperti sita jaminan.

4. Asas – Asas Pemeriksaan :

Pada dasarnya tunduk sepenuhnya pada tata tertib yang diatur dalam hukum acara perdata, yang meliputi :

- a. dilakukan oleh majelis hakim.
- b. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.
- c. Pemeriksaan dilaksanakan 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan.
- d. Upaya mendamaikan diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung.

2. Hukum Acara Perdata yang Berlaku di Peradilan Agama

Para ahli hukum banyak memberikan definisi tentang hukum acara, salah satunya seperti yang diuraikan pada bab pendahuluan di atas, bahwa hukum acara perdata adalah Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum materiil.

Melihat batasan – batasan yang dikemukakan oleh para ahli hukum, dapat diketahui bahwa hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tentang tatacara mengajukan gugatan di pengadilan, bagaimana

pihak tergugat mempertahankan diri terhadap gugatan penggugat, bagaimana hakim bertindak baik sebelum atau ketika memeriksa perkara, bagaimana hakim memutuskan perkara, serta bagaimana melaksanakan putusan, sehingga hak dan kewajiban dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁶³

Ketentuan hukum acara baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan rumusan pasal 54 yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang – undang ini.⁶⁴

Oleh karena hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Inlands Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura, serta *Rechtsredlement Voor De Buitengewesten* (R.Bg) untuk luar Jawa dan Madura, maka kedua aturan ini diberlakukan juga di lingkungan peradilan agama, kecuali yang diatur khusus dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, misalnya : pembebanan biaya perkara, pembuktian dengan *alasan syiqaq*, gugatan cerai yang didasarkan atas alasan zina (*li'an.*), serta beberapa ketentuan lainnya.⁶⁵

Berkaitan dengan kekhususan acara tersebut, adalah kekhususan acara dalam menyampaikan panggilan dalam perkara perceraian yang pihak

⁶³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenata Media 2005) hlm.2

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 7

⁶⁵ *Ibid*

tergugat atau termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. persegaimana yang telah uraikan dalam bab pendahuluan di atas, yang hal tersebut diatur khusus dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan kekhususan dari aturan pemanggilan dalam pasal 390 HIR/ 718 R.Bg, yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara perceraian, bila Tergugat tidak jelas kediamannya atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediamaan tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan pengadilan, sebanyak 2 kali pengumuman. Jarak pengumuman pertama dan kedua adalah satu bulan, dan tengang waktu panggilan yang terakhir sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan.

Mahkamah Agung RI⁶⁶ menentukan bahwa hukum – hukum yang diberlakukan sebagai hukum acara di peradilan agama adalah :

1. HIR
2. R.Bg.
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 5
Tahun 2009.

⁶⁶ Mahkamah Agung RI, *Op.cit* Hlm. 57 - 58

5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasa dalam Rumah Tangga.
8. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.
9. Yurisprudensi.
10. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
11. Kompilasi Hukum Islam
12. Peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan peradilan agama

C. Prinsip Pembuktian dan Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata.

1. Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Prinsip dasar pembuktian dalam hukum acara perdata adalah ketentuan pasal 163 HIR/ 283 R.Bg yang menyatakan bahwa jika dalil gugatan penggugat dibantah tergugat, amaka penggugat wajib membuktikan, sedang tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.⁶⁷

⁶⁷ Mahklamah Agung RI, *Op.cit.* Hlm. 89

Pembuktian, menurut M. Yahya Harahap dalam Abdul Manan,⁶⁸ yang dimaksud dengan Pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa – peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Dalam arti sempit hanya diperlukan sepanjang mengenai hal – hal yang dibantah atau hal yang disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak – pihak yang berperkara.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang – undang.⁶⁹

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang menjadi sengketa. Sehubungan dengan itu, maka hal yang penting dalam pembuktian adalah :

1. Tentang apa yang harus dibuktikan
2. Tentang siapa yang harus membuktikan
3. Tentang hal apa yang tidak perlu dibuktikan.⁷⁰

Sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR/ 284 R.Bg. ada 5 (lima) macam alat bukti, yaitu Bukti Surat, Bukti Saksi, Persangkaan, Sumpah.⁷¹

Uraian dari masing – masing alat bukti tersebut sebagai berikut :

⁶⁸ Abdul Manan, *Op.Cit.* Hlm 227

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.* Hlm. 228

1. Bukti Surat.

Sudikno Mertokusumo, dalam Abdul Manan⁷² mendefinisikan alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran dan dipergugatan sebagai pembuktian.

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah pasal 164, 165 dan 167 HIR, 284, 293, 294 ayat (2), 164 R.Bg, menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta⁷³.

Surat sebagai bukti tertulis dapat dibedakan dalam Akta, dan Surat Bukan Akta. Akta dapat dibedakan menjadi Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan. Jadi dalam hukum pembuktian ini, dikenal paling tidak tiga jenis surat, yaitu : 1. Akta Autentik, 2. Akta di bawah Tangan, 3. Surat Bukan Akta.⁷⁴

2. Bukti Saksi.

Perihal bukti saksi ini, diatur dalam 145, 146, 169 – 172 HIR, dan Pasal 172, 174, 306 – 309 R.Bg. Kesaksian, adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan ajalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.⁷⁵

⁷¹ Mahklamah Agung RI, *Op.cit.* Hlm. 89

⁷² Abdul Manan, *Op.cit.* Hlm. 240

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Mahkamah Agung RI, *Op.Cit.* Hlm. 93

Dalam menimbang kesaksian, hakim harus memperhatikan kesesuaian kesaksian saksi yang satu dengan lainnya, alasan atau sebab mengapa saksi – saksi memberikan keterangan tersebut, cara hidup, adat dan martabat saksi dan segala ihwal yang dapat mempengaruhi saksi sehingga saksi tersebut dapat dipercaya.⁷⁶

Tentang siapa orang – orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 145/ 172 R.Bg. Demikian pula yang dapat mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian adalah diatur dalam pasal 146 HIR/ 174 R.Bg.

3. Persangkaan.

Persangkaan, adalah kesimpulan yang oleh undang – undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.⁷⁷

Persangkaan ada 2 (dua) macam, yaitu :

- Berdasar undang – undang.
- Bukan berdasar undang – undang.

4. Pengakuan

Pengakuan adalah keterangan sepihak darisalah satu pihak dalam satu perkara dimana ia membenarkan apa – apa yang dikemukakan oleh pihak lawan⁷⁸

Pengakuan di hadapan hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantara kuasanya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak.⁷⁹

⁷⁶ Pasal 172 HIR/ 172 R.Bg.

⁷⁷ Pasal 1915 KUHPerdara.

⁷⁸ Pasal 174 HIR/ 311 R.Bg.

Pengakuan yang diucapkan di luar sidang, diserahkan kepada pertimbangan hakim.⁸⁰

5. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu member janji atau keterangan dengan mengingat kemahakuasaan Allah yang percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.⁸¹

Bukti sumpah dibagi menjadi 2 (dua) macam, Sumpah Pelengkap dan Sumpah Pemutus. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah pelengkap, supaya dengan sumpah tersebut perkara dapat diputuskan.⁸² adapun Sumpah Pemutus diatur dalam pasal 156 HIR/ 183 R.Bg. yakni sumpah yang dapat dimintakan oleh salah satu pihak berperkara karena tidak ada bukti sama sekali.

Jika sumpah diucapkan, hakim tidak diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah.⁸³

2. Prinsip Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata.

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam sidang yang terbuka

⁷⁹ Pasal 174 HIR/ 311 R.Bg.

⁸⁰ Pasal 175 HIR/ 312 R.Bg.

⁸¹ Mahkamah Agung RI, *Op.Cit.* Hlm.98

⁸² Pasal 155 HIR/ 182 R.Bg.

⁸³ Pasal 177 HIR/ 314 R.Bg.

untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara⁸⁴.

Setiap putusan harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani oleh hakim ketua dan hakim – hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua pengadilan serta ditanda tangani pula oleh panitera pengganti yang ikut sidang sesuai dengan penetapan panitera.⁸⁵

Dalam putusan perdata, mewajibkan hakim untuk mengadili semua tuntutan sebagaimana tersebut dalam gugatan.⁸⁶ Kecuali, apabila hal – hal yang tidak dituntut tersebut disebut dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam pasal 41c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 , junto pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Ada berbagai macam pembagian atau klasifikasi putusan, dan putusan verstek merupakan salah satu jenis putusan, dilihat dari segi isinya⁸⁷. Pengertian utusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat, ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without reason*). Putusan verstek merupakan pengecualian dari acara sidang biasa atau acara kontradiktur dan prinsip *audi et alteram partem* sebagai akibat ketidak hadiran tergugat atas alasan yang tidak sah. Dalam acara verstek, Tergugat

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1988) hlm 167.

⁸⁵ Abdul manan, *Op.Cit.* Hlm. 292

⁸⁶ Pasal 178 (2) / 189 R.Bg.

⁸⁷ Mahkamah Agung, *Op.Cit.* Hlm. 116

dianggap ingkar memenuhi persidangan tanpa alasan yang sah dan dalam hal ini dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulan semua dalil gugatan penggugat. Putusan verstek ini hanya dapat dijatuhkan dalam tergugat atau para tergugat semuanya tidak hadir pada sidang pertama. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 tahun 1964, pengertian hari sidang pertama (*ten dage dienende*) dapat juga diartikan pada hari sidang kedua (*ten dage dat de zaak dient*).⁸⁸

Selain itu, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian pendahuluan di atas, bahwa prinsip dalam menjatuhkan putusan verstek adalah Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ia tidak mengirim orang lain untuk hadir dalam sidang sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Serta Tergugat tidak mengajukan eksepsi (perlawanan) tentang kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara.

Asas Kepastian Hukum

Kata “Asas” berasal dari Bahasa Arab, “*asasun*”, yang artinya adalah dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. A.W. Munawir sebagaimana dikutip oleh Lalu Wira Priatna dalam Dyah Ochtorina Susanti, menyatakan bahwa asas sama dengan “*ussu*” atau “*al-ussu*” dan “*asasu*” atau “*al-asasu*”, jamak dari *ussu* adalah *isaasu*, yang berarti permulaan bangunan, *al- mubtadau kullu saiin* (permulaan segala sesuatu). Jika dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah

⁸⁸ *Ibid*

kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁸⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Asas berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berfikir atau bertindak, atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, atau bertindak dan sebagainya.⁹⁰ Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Principle* yang berarti *a basic rule, law or doctrine*.⁹¹

Asas Hukum merupakan sesuatu yang melahirkan peraturan – peraturan/ aturan – aturan hukum, merupakan *ratio legis* dari aturan ataupun peraturan hukum. Dengan demikian, asas hukum lebih abstrak dari aturan ataupun peraturan hukum.⁹²

Satjipto Rahardjo, dalam Rusli Effendy, dkk menuliskan bahwa asas hukum adalah jantungnya hukum. Asas hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret, melainkan pikiran dasar yang bersifat umum dan merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum, yang terjelma dalam wujud peraturan perundang – undangan maupun putusan hakim. Salah satu fungsi ilmu hukum adalah menemukan asas di dalam hukum positif.⁹³ Fungsi dari asas – asas hukum, tidak lain untuk menjaga konsistensi tetap dapat dipertahankan dalam suatu sistem hukum, untuk menjaga agar konflik – konflik yang mungkin

⁸⁹ Dyah Ochtorina Susanti, *Disertasi : Pembentukan Persekutuan Komanditer (Comanditaire Vennotschap) Berasar Akad Musyarakah*, (Malang : Universitas Brawijaya 2011) hlm. 97

⁹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka). Hlm. 32.

⁹¹ Bryan a. Garner. *Op.cit.* Hlm. 1313.

⁹² Rusli Efendy, Ahmad Ali, Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, (Ujung Pandang : Hasanudin University Press, Cetakan Pertama, 1991). Hlm.28.

⁹³ *Ibid.* hlm. 29

timbul dalam sistem hukum. Asas – asas hukum pun berfungsi untuk menerbitkan aturan yang lebih konkret dan khusus serta kasuistik.

Nilai – nilai dasar dari hukum menurut Gustav Radbruch ada 3, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kegunaan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Sekalipun ketiga – tiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat *spannungsverhaitnis*, suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian itu bisa dimengerti, oleh karena sebagaimana diuraikan di muka, ketiga – tiga berisi tuntutan yang berlain – lainan dan satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan.⁹⁴

Bagi hukum yang ingin menciptakan kepastian hukum dalam hubungan antara orang – orang dalam masyarakat dan untuk itu menurut Satjipto Rahardjo terlebih dahulu harus menciptakan suatu kepastian pula di dalam tubuhnya sendiri. Tuntutan terakhir ini dapat mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinya, yaitu susunan tata aturan yang penuh dengan konsistensi.⁹⁵

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan.⁹⁶

⁹⁴ Herowati Poesoko, Iswi Hariyani, Emi Zulaika, *Laporan Penelitian : Kepastian Parate Executie atas Obyek Hak Tanggungan Dalam Rangka Percepatan Pelunasan Kredit Macet* (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember : 2006). Hlm.8.

⁹⁵ *Ibid.* Hlm. 9

⁹⁶ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005). Hlm. 71

Menurut Sudikno Mertokusumo⁹⁷, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Radbruch memberi pendapat yang mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, yakni perundang – undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan(fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁹⁸ Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.

Fence M.Wantu⁹⁹ juga menyatakan bahwa ukuran atau kriteria dari kepastian hukum itu sendiri dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan hukum, artinya apat mudah dimengerti oleh rakyat ;
- b. Aturan hukum tidak bertentangan antara satu dengan lainnya ;

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007). Hlm. 106.

⁹⁸ Wulanda Roselina, *Prinsip – Prinsip Akuisisi Saham Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha* (Jember : Universitas Jember, Proposal Tesis 2014) Hlm. 25.

⁹⁹ *Ibid*

- c. Aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku di luar kemampuan subjek hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan ;
- d. Pengakuan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum ;
- e. adanya pengakuan dari warga negara prinsipil terhadap aturan – aturan hukum;
- f. Kepastian hukum dalam hal di pengadilan ditandai dengan sikap kemandirian hakim dan tidak memihak dalam aturan – aturan hukum ;
- g. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan kejelasan objek yang menjadi sengketa ;
- h. Kepastian hukum di pengadilan harus menentukan jelas objek yang dimenangkan oleh pihak – pihak yang berperkara,
- i. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan dapat dieksekusi atau dilaksanakannya putusan.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal – pasal dalam undang – undang melainkan juga

adanya konsistensi dalam putusan hakim antara satu dengan lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁰⁰



¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008). Hlm. 158.